PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PANITIA SELEKSI INSTANSI DAERAH PENGADAAN PEGAWAI ASN
Jalan Panglima Batur Nomor 33 KANDANGAN Kode Pos 71211
Telp (0517) 21146 Fax (0517) 22650

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2 / 1680 / BKPSDM
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

A. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah Alokasi Formasi sebanyak 169 dengan rincian :

1. Tenaga Teknis : 142 formasi
2. Tenaga Kesehatan : 27 formasi

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini dan dapat dilihat pada laman https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id/.

B. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri PANRB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024;

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MENGIKUTI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.

C. KRITERIA PELAMAR

1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan **Perguruan Tinggi** yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;
2. Formasi Khusus Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (disabilitas fisik dan/atau sensorik) dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, dan berkomunikasi;
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024, yaitu:
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
   b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

D. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;

3. Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
4. Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
5. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar CPNS, kecuali jabatan tertentu yang dijelaskan pada poin **Persyaratan Khusus**;
6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
11. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
12. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (dengan menandatangani surat pernyataan);
15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
16. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; dan
17. Bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tidak mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS atau mutasi ke luar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama minimal 10 (sepuluh) tahun masa kerja;

E. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN CPNS

1. Pelamar CPNS terdiri dari 169 (seratus enam puluh sembilan) Formasi Umum termasuk didalamnya 3 (tiga) Alokasi Formasi Khusus Disabilitas dengan rincian formasi dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh

lima) tahun pada saat melamar, **dikecualikan** bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.

3. PPPK dapat melamar pada lowongan pada formasi CPNS dengan ketentuan:
   a. Wajib memenuhi Masa Perjanjian kerja Minimal 1 (satu) tahun terhitung sesuai dengan tanggal perjanjian kerja PPPK;
   b. Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Yang Berwenang (Pyb) yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024;
4. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai CPNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
   a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;
   b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Pelamar CPNS yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.
   a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
   b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
   c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
7. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR), yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan

Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk Melamar Pada Jabatan Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 yang dapat dilihat di https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id/.

8. Pelamar dapat menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar Tahun Anggaran 2023 dalam pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024.
9. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi Pendidikan D-III, D-IV, S.1, dan Profesi dengan persyaratan nilai minimal = 2,75.
10. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya.
11. Bagi penyandang disabilitas yang m8endaftar formasi khusus disabilitas wajib mengunggah pada aplikasi SSCASN berupa:
    a. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 melalui portal/website https://sscasn.bkn.go.id/
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada portal/website https://sscasn.bkn.go.id/.

G. DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 **wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas** dengan cara **di scan (dengan scanner/mesin scan)** kemudian **di unggah** melalui portal/website https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat (format PDF, ukuran Maksimal 500 kb). Jika KTP pelamar rusak/tidak terbaca dengan jelas, maka peserta segera memperbaiki KTP pada Dinas Pencatatan Sipil setempat sebelum melakukan unggah/upload pada

aplikasi SSCASN;

2. Surat lamaran yang ditujukan kepada **Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandangan**, di ketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi E-Materai Rp. 10.000,- (format PDF, ukuran Maksimal 1000 kb);
3. Pas foto *close up formal* berwarna terbaru, tampak depan (bukan foto yang di foto kembali) **kemeja formal**, **berlatar belakang merah, dan untuk wanita yang menggunakan Jilbab/kerudung berwarna hitam** (format JPG, ukuran Maksimal 500);
4. Scan Ijazah dan Transkrip asli sesuai kualifikasi Pendidikan (hasil scan berwarna, bukan Fotocopy yang di Legalisir, format PDF, ukuran Maksimal 1000 kb). Tambahan khusus untuk:
   a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
   b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
   c. STR diupload bersama Ijazah untuk pelamar formasi tenaga kesehatan;
   d. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan minimal yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Surat Pernyataan 5 poin ditandatangani dengan ditempel E-Materai Rp. 10.000,- (format PDF, ukuran Maksimal 1000 kb).
6. Penyandang Disabilitas dapat melamar dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:
   a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, (format PDF, ukuran Maksimal 1000 kb), dan;
   b. Menyampaikan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar;
   c. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

H. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id/;
2. Panitia seleksi instansi daerah dapat menerima atau menolak alasan

sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

3. Panitia seleksi instansi daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

I. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 Oktober s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non – CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usulan Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

- **Jadwal Tentatif sesuai dengan ketentuan Panitia Seleksi Nasional**

J. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**.
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai Negeri Sipil (NIP PNS), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id/. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
7. Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 membuka **helpdesk** melalui: https://sscasn.bkn.go.id/;
8. Tempat pelaksanaan tes ditentukan kemudian, Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id/.
9. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 disampaikan pada hari dan jam kerja melalui:
   a. Telegram : cpns2024hss
   b. Facebook : https://www.facebook.com/bkpsdm.kabhss

Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp atau media lainnya** selain yangdisebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikin pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Kandangan
Pada Tanggal 16 Agustus 2024

Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Seltan,

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, MAP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198602 1 004

Lampiran Pengumuman
Nomor : 800.1.2 / 1680 / BKPSDM
Tanggal : 16 Agustus 2024
Tentang : Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggatan 2024

A. Formasi Tenaga kesehatan

No.	Nama Jabatan	Nama Sub Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
1	Apoteker Ahli Pertama		Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG NON MEDIK	PROFESI APOTEKER	
2	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	
3	Dokter Ahli Pertama	Dokter (Umum)	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LOKSADO	PROFESI DOKTER	
4	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - RSUD DAHA SEJAHTERA - SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	
5	Dokter Ahli Pertama	Dokter (Umum)	Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	PROFESI DOKTER	
6	Dokter Ahli Pertama	Dokter (Umum)	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GAMBAH	PROFESI DOKTER	
7	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	SPESIALIS BEDAH SARAF	
8	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Bedah (Umum)	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - RSUD DAHA SEJAHTERA - SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	SPESIALIS BEDAH	
9	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	

10	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - RSUD DAHA SEJAHTERA - SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
11	Dokter Ahli Pertama	Dokter (Umum)	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KALUMPANG	PROFESI DOKTER	
12	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI	
13	Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Bedah (Umum)	Fungsional	2	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	SPESIALIS BEDAH	
14	Dokter Gigi Ahli Pertama	Dokter Gigi (Umum)	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BAJAYAU	PROFESI DOKTER GIGI	
15	Fisikawan Medis Ahli Pertama		Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	PROFESI FISIKA MEDIK ; PROFESI FISIKAWAN MEDIK ; S-1 FISIKA (MINAT FISIKA MEDIS)	
16	Fisioterapis Ahli Pertama		Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	D-IV FISIOTERAPI ; PROFESI FISIOTERAPIS	
17	Okupasi Terapis Terampil		Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	D-III OKUPASI TERAPI ; D-III TERAPI OKUPASI	
18	Penata Anestesi Ahli Pertama		Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI	

No.	Nama Jabatan	Nama Sub Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
19	Perawat Ahli Pertama		Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - RSUD DAHA SEJAHTERA - SEKSI KEPERAWATAN DAN PENUNJANG NON MEDIK	PROFESI NERS	
20	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil		Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BARUH JAYA	D-III ANALIS KESEHATAN	
21	Radiografer Ahli Pertama		Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI ; D-IV TEKNIK RADIOLOGI	
22	Teknisi Elektromedis Terampil		Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - RSUD DAHA SEJAHTERA - SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK	
23	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama		Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - RSUD DAHA SEJAHTERA - SEKSI KEPERAWATAN DAN PENUNJANG NON MEDIK	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN) ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU)	
24	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama		Fungsional	1	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG NON MEDIK	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN	
25	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil		Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS NEGARA	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III SANITASI	
26	Terapis Gigi dan Mulut Terampil		Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BAJAYAU	D-III KEPERAWATAN GIGI ; D-III KESEHATAN GIGI ; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	
	Jumlah Keseluruhan Formasi Tenaga kesehatan			**27**			

B. Formasi Tenaga Teknis

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
1	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA - BIDANG PARIWISATA	S-1 PARIWISATA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; D-IV MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
3	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH - BIDANG PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI	
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - BAGIAN ORGANISASI	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	
5	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	
6	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	
7	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN PEMERINTAHAN	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 HUKUM ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU POLITIK ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK	
8	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH - BIDANG ANGGARAN - SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN SKPD	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 EKONOMI	
9	Analis Perdagangan Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERDAGANGAN - BIDANG SARANA PRASARANA DAN PELAKU PERDAGANGAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
10	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERHUBUNGAN - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	
11	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS KETAHANAN PANGAN - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 INFORMATIKA	
12	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV KEARSIPAN ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 MANAJEMEN	
13	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV KEARSIPAN ; S-1 KEARSIPAN	
14	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERTANIAN - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 KEHUTANAN	
15	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - SEKRETARIAT - SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 KEARSIPAN ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	
16	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - BIDANG KEARSIPAN	S-1 KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN	
17	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - BAGIAN UMUM - SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT DAERAH	S-1 KEARSIPAN	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
18	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - SEKRETARIAT - SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III KEARSIPAN	Formasi Khusus Disabilitas
19	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III KEARSIPAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
20	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 PSIKOLOGI	
21	Asisten Perpustakaan Terampil	Fungsional	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - BIDANG PERPUSTAKAAN	D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III PERPUSTAKAAN, INFORMASI, DAN KEARSIPAN ; D-III PERPUSTAKAAN ; D-III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; D-III TEKNIK PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI ; D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN	
22	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	4	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 HUKUM	
23	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	3	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 HUKUM	
24	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	3	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK	
25	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	4	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK	
26	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	5	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK	
27	FASILITATOR PEMERINTAHAN	Pelaksana	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
28	Manggala Informatika Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI	
29	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN - BIDANG TENAGA KERJA	S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	
30	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS SOSIAL - BIDANG REHABILITASI SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	
31	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Fungsional	2	DINAS SOSIAL - BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	
32	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS SOSIAL - BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	
33	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - BIDANG CIPTA KARYA	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	
34	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - BIDANG PENANAMAN MODAL	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 ILMU KOMPUTER	
35	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - BIDANG CIPTA KARYA	S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	
36	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	Fungsional	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - BIDANG CIPTA KARYA	D-III TEKNIK ELEKTRONIKA ; D-III TEKNOLOGI SIPIL	
37	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - BAGIAN UMUM - SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	
38	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
39	Penata Perizinan Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM	
40	Penata Ruang Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - BIDANG TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI	D-IV PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	
41	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN - BIDANG TENAGA KERJA	S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PSIKOLOGI	
42	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN - BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI	
43	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	3	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	
44	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	3	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	
45	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	2	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	
46	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	2	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
47	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	3	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	
48	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	Pelaksana	2	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN - SUB BAGIAN PROTOKOL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III KOMUNIKASI MASSA	
49	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERIKANAN - BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	D-IV AKUAKULTUR ; S-1 AKUAKULTUR ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERAIRAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	
50	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Fungsional	2	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 FARMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER	
51	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 SANITASI LINGKUNGAN	
52	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERTANIAN - BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	S-1 PROTEKSI TANAMAN	
53	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN - UPTD LOGAM NAGARA	S-1 TEKNIK INDUSTRI	
54	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERTANIAN - BIDANG PENYULUHAN DAN USAHA PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
55	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERTANIAN - BIDANG PENYULUHAN DAN USAHA PERTANIAN	D-IV PENYULUH PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 MANAJEMEN PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	
56	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS SOSIAL - BIDANG REHABILITASI SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	
57	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS SOSIAL - BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL	
58	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Fungsional	3	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN HUKUM	S-1 HUKUM	
59	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Fungsional	1	SEKRETARIAT DPRD - BAGIAN FASILITASI PEMBENTUKAN LEGISLASI DAERAH DAN KEHUMASAN DPRD	S-1 HUKUM	
60	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - SEKRETARIAT - SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	
61	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - BAGIAN UMUM - SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU EKONOMI ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 AKUNTANSI	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
62	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERTANIAN - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN PERENCANAAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	
63	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV SANITASI LINGKUNGAN	
64	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI MANAJERIAL	
65	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH - BIDANG ANGGARAN - SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN PENGELUARAN	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI	
66	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - SEKRETARIAT	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	
67	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN PERENCANAAN	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI	
68	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERHUBUNGAN - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
69	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 POLITIK ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	
70	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - BIDANG PERENCANAAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 POLITIK ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	
71	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	D-IV KOMUNIKASI MASSA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM ; S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
72	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 TEKNIK KOMPUTER	
73	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI	
74	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN PERENCANAAN	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
75	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
76	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - BIDANG PERENCANAAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	
77	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI	
78	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH - BIDANG PERENCANAAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN - SUB BIDANG PENDATAAN	S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK	
79	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH - BIDANG ANGGARAN	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	
80	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH - BIDANG ANGGARAN	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	**Formasi Khusus Disabilitas**
81	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS PERDAGANGAN - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	
82	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI	
83	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
84	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN KEUANGAN	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	
85	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ANGKINANG - TATA USAHA PUSKESMAS ANGKINANG	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
86	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BAJAYAU - Tata Usaha Puskesmas Bajayau	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
87	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BAMBAN - Tata Usaha Puskesmas Bamban	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
88	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BARUH JAYA - Kepala Sub Bagian Tata Usaha	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
89	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BAYANAN - TATA USAHA PUSKESMAS BAYANAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
90	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GAMBAH - TATA USAHA PUSKESMAS GAMBAH	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
91	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JAMBU HILIR - Tata Usaha Puskesmas Jambu Hilir	D-III TEKNIK INFORMATIKA	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
92	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KALIRING - Tata Usaha Puskesmas Kaliring	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
93	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KALUMPANG - TATA USAHA PUSKESMAS KALUMPANG	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
94	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KANDANGAN - Tata Usaha Puskesmas Kandangan	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
95	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LOKSADO - TATA USAHA PUSKESMAS LOKSADO	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
96	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS MALINAU - Tata Usaha Puskesmas Malinau	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
97	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG BATUNG - Tata Usaha Puskesmas Padang Batung	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
98	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASUNGKAN - TATA USAHA PUSKESMAS PASUNGKAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
99	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SIMPUR - TATA USAHA PUSKESMAS SIMPUR	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
100	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUNGAI PINANG - TATA USAHA PUSKESMAS SUNGAI PINANG	D-III TEKNIK INFORMATIKA	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
101	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUNGAI RAYA - TATA USAHA PUSKESMAS SUNGAI RAYA	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
102	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TELAGA LANGSAT - TATA USAHA PUSKESMAS TELAGA LANGSAT	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
103	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS WASAH - Tata Usaha Puskesmas Wasah	D-III TEKNIK INFORMATIKA	
104	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	
105	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	**Formasi Khusus Disabilitas**
106	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	KECAMATAN ANGKINANG - SEKRETARIAT KECAMATAN - SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI	
107	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - BAGIAN ORGANISASI	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	
108	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	
109	Sandiman Ahli Pertama	Fungsional	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI	

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Ket.
110	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	Pelaksana	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - BAGIAN UMUM - SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV ILMU KOMPUTER ; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	
Jumlah Keseluruhan Formasi Teknis			**142**			

Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198602 1 004